

## ANALISIS

# Lampu Kuning untuk Ma'ruf Amin

CNN Indonesia | Kamis, 15/11/2018 09:41 WIB



Joko Widodo-Ma'ruf Amin. (REUTERS/Darren Whiteside)

Jakarta, CNN Indonesia -- Agustus 2018, Peneliti Lingkaran [Survei](#) Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby pernah mewanti-wanti tentang tren penurunan elektabilitas saat [Joko Widodo](#) memilih [Ma'ruf Amin](#) sebagai pendampingnya di Pilpres 2019.

Kala itu, berdasarkan survei lembaga milik Denny JA itu, elektabilitas Jokowi tanpa pasangan cawapres memperoleh dukungan sebesar 53,6 persen. Sedangkan elektabilitas Jokowi ketika berpasangan dengan Ma'ruf justru menurun di angka 1,4 persen di angka 52,2 persen.

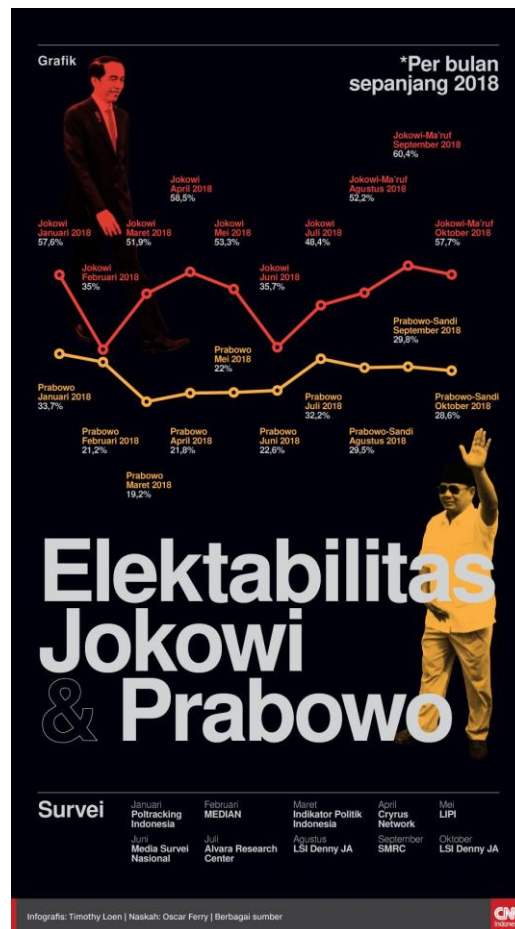
Kondisi sebaliknya justru dialami oleh Prabowo Subianto. Elektabilitas ketua umum Partai Gerindra itu meningkat selepas memilih Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebagai Cawapres. Elektabilitas Prabowo tanpa pasangan cawapres berada di angka 28,8 persen. Elektabilitas Prabowo saat dipasangkan dengan Sandiaga Uno sebagai cawapres meningkat hingga 29,5 persen.

Namun, hingga November 2018, kekhawatiran Adjie belum terbukti. Meskipun berdasarkan survei sejumlah lembaga elektabilitas Jokowi-Ma'ruf turun naik.

Survei terbaru LSI yang dirilis 14 November 2018 menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 57,7 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga 28,6 persen.

Meski ada kecenderungan naik, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dinilai belum cukup aman, mengingat pemilihan presiden baru digelar April 2019. Masih ada waktu sekitar empat

bulan.



(CNN Indonesia/Timothy Loen)

Kekhawatiran LSI soal tergerusnya elektabilitas Jokowi oleh Ma'ruf cukup beralasan. Dalam beberapa pekan terakhir Ma'ruf dianggap justru terlihat terjebak permainan lawan politik. Ini menjadi lampu kuning atau wanti-wanti bagi Ma'ruf agar tidak blunder dan menggerus elektabilitas.

Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada Wawan Masudi mengatakan pernyataan-pernyataan Ma'ruf merupakan bukti bahwa Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu mengikuti permainan dari pihak lawan yang selama ini, menurut Wawan, kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan negatif.

"Ini kan agresif. Kelompok sebelah juga agresif. Jadi menurut saya kalau dijawab seperti ini jadinya kontraproduktif," kata Wawan kepada *CNNIndonesia.com*.

Pernyataan-pernyataan Ma'ruf memicu kontroversi dan menarik perhatian banyak pihak. Bahkan, tak jarang, pernyataan yang dilontarkan Ma'ruf dalam masa kampanye mendapat respons negatif banyak pihak.

Lihat juga: [Ma'ruf Amin Yakin Didukung Seluruh Warga NU Jakarta](#)

Mulai dari dicap berbohong karena menyatakan Mobil Esemka diluncurkan besar-besaran pada Oktober hingga menggunakan istilah buta-budek dalam pidatonya saat meresmikan posko dan deklarasi relawan di Cempaka Putih Timur.

Pernyataan Buta-Budek itu diprotes Forum Tunanetra. Rombongan kecil penyandang tunanetra pun berunjuk rasa di depan kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tak hanya itu, Advokat Senopati 08 melaporkan Ma'ruf ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga melanggar pasal 280 ayat 1 C, D, dan E serta pasal 521 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



Warga tunanetra menuntut permintaan maaf Ma'ruf Amin atas pernyataan buta-budek.

(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Pasal tersebut memuat Larangan Dalam Kampanye. Pelaksana, Peserta, dan tim Kampanye dilarang (c). menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; (d). menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; (e) mengganggu ketertiban umum.

Kata Wawan, Ma'ruf dan para petarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 harus berhati-hati saat bertutur kata. Fokus masyarakat kini tak lagi hanya pada substansi visi dan misi calon pemimpin.

"Diksi. Hati-hati dalam memilih kata karena sekarang tidak hanya soal substansi tapi bagaimana menyampaikan pesan dan substansinya kepada masyarakat," tuturnya.

Kejadian serupa juga menimpa Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto karena menganalogikan orang susah dengan tampang Boyolali. Pernyataan itu membuat

masyarakat Boyolali demo besar-besaran.

Wawan berpendapat akan lebih baik apabila tim pasangan nomor urut 01 memberikan masukan kepada Ma'ruf mengenai komunikasi politik.

"Kyai Maruf memang seorang tokoh agama, beliau Ketua MUI, ulama besar. Tapi ini kontestasi politik," ujar Wawan menegaskan.



Ma'ruf Amin. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Hingga kini, belum ada hasil survei terbaru mengenai elektabilitas kedua pasangan calon pasca pernyataan itu.

Wawan tak menampik jenis komunikasi politik agresif bisa berdampak buruk bagi elektabilitas pasangan nomor urut 01. Padahal, awalnya Ma'ruf dipilih karena diyakini dapat menggerek elektabilitas Jokowi dalam Pilpres 2019.

Jokowi dan Maruf diimbau fokus dan konsisten dengan prinsip awal yakni menyampaikan kinerja empat tahun pemerintahan Jokowi dan rencana kerja saat periode kedua.

"Intinya jangan mengikuti permainan lawan," ucap Wawan.

**Lihat juga:** [PAN Yakin Soetrisno Bachir Tak Berpaling Meski Doakan Ma'ruf](#)



Jokowi-Ma'ruf. (REUTERS/Darren Whiteside)

## 2. Pengaruh Elektabilitas

Tim Kampanye Nasional (TKN) menilai pernyataan Ma'ruf, terutama soal 'buta-budek' tak mengganggu elektabilitas Jokowi mendatang.

Direktur Program dan Kampanye TKN Aria Bima meyakini pasangan ini tidak akan kehilangan suara karena pernyataan kiasan itu.

"Tidak ada masalah. Kami jelaskan program disabilitas dalam empat tahun terakhir Jokowi dan dikuatkan dengan visi misi yang ada di situ. Kami bukan lagi narasi," kata Aria Bima kepada *CNNIndonesia.com*.

Jokowi belakangan menaruh perhatian kepada penyandang disabilitas. Ia bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi fasilitas umum demi memudahkan akses bagi penyandang disabilitas.

Lihat juga: [Warga Tunanetra Demo di MUI Tagih Maaf Ma'ruf soal Buta-Budek](#)

Tak hanya itu, Presiden juga memudahkan akses bagi difabel dalam penyelenggaraan Asian Para Games 2018 beberapa waktu lalu. Jokowi juga membuka perhelatan empat tahunan sekali itu menggunakan bahasa disabilitas.

Hal itu dipelajari Jokowi langsung dari aktivis tuli Surya Sahetapy. Mantan Wali Kota Solo ini sangat diapresiasi penyandang disabilitas karena membuat bahasa isyarat diakui publik.

Surya beberapa kali ke Istana dan masuk dalam video blog Presiden. Ia bahkan direkrut langsung menjadi staf khusus. Namun, hal itu terealisasi karena Surya harus menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 di Amerika Serikat.

Jokowi juga telah meningkatkan anggaran untuk berbagai bantuan sosial kelompok masyarakat rentan dari Rp5,6 triliun pada 2015 menjadi Rp9,98 Triliun pada 2016.

Aria Bima meyakini masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berpolitik dan mengerti pernyataan Maruf Amin tak bermaksud mendiskreditkan kaum disabilitas.

"Itu semua orang ngerti. Sama seperti wajahmu seindah bulan, bulan itu kan *kroek-kroek* (tidak rata). Padahal itu maksudnya yang mulus dan cantik," ucap Politikus PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, TKN tidak akan memberikan pelatihan atau masukan khusus terhadap Ma'ruf mengenai cara berkomunikasi politik demi menjaga bahkan meningkatkan elektabilitas.

"Ke depan Kiai Maruf akan diberi ruang menyampaikan dalam bentuk konsepsi, pemikiran-pemikiran," tuturnya.

Lihat juga: [TKN Minta Kubu Prabowo-Sandi Setop Politisasi 'Budek-Buta'](#)

**(ugo)**